



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI SURABAYA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SRI SULASTUTI  
2. Jabatan : HAKIM  
3. NHK : 481369

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **1.295.000.000**

1. Tanah Seluas 95 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/105 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
3. Tanah Seluas 4.860 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 133 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah Seluas 6.170 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. Tanah Seluas 7.099 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
7. Tanah Seluas 5.702 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
8. Tanah Seluas 1.655 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m2/17 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/80 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **235.000.000**



1. MOBIL, AVANZA 1,5 VELOZ MT MINI BUS Tahun 2020, HASIL  
SENDIRI Rp. 235.000.000

<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	281.398.667
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	1.811.398.667
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	1.811.398.667

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.